

PENGARUH KOLABORASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Zumrotul Latifah, Wildia Nusyaifi, Wildhan Romdhoni

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 220721100093@student.trunojoyo.ac.id, 220721100063@student.trunojoyo.ac.id,
2207211000217@student.trunojoyo.ac.id

Abstrak

Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dan keuangan secara efektif untuk menjamin stabilitas ekonomi. Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan tujuan mengelola anggaran secara efektif, meningkatkan kesejahteraan warga negara dan menjamin stabilitas perekonomian secara umum. Hal ini mempunyai peran penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil baik dalam hubungan ekonomi internal maupun eksternal. Selain itu, pemerintah bertujuan untuk menjaga perekonomian tetap terkendali dan mendukung sistem keuangan yang stabil dengan mengatur kebijakan moneter. Dengan bekerja sama dengan bank sentral, pemerintah dapat mencapai tujuan pertumbuhan ekonominya. Kebijakan moneter dan fiskal harus saling mendukung satu sama lain, karena jika kebijakan-kebijakan tersebut bertentangan satu sama lain, maka efisiensi perekonomian dapat terganggu. Interaksi yang sehat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan langkah penting menuju pencapaian tujuan bersama. Hubungan ini dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang cepat dan stabil.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian. Tujuan perekonomian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat harga merupakan indikator penting dalam perekonomian modern karena menjaga keseimbangan alokasi sumber daya. Inflasi yang tinggi dapat mengaburkan indikator ini dan mendistorsi harga, sehingga menyulitkan perencanaan dan mengurangi motivasi untuk menabung dan berinvestasi. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan secara merata. Pendapatan per kapita merupakan ukuran kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi parameter penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara.¹

Meski memiliki sumber daya manusia yang kompeten, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan diharapkan mampu mengelola perekonomian baik pada tingkat mikro maupun makro. Salah satu peran utama pemerintah dalam pengelolaan perekonomian adalah menciptakan dan memelihara stabilitas perekonomian. Stabilitas ini dicapai melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal didorong oleh pemerintah dengan empat tujuan utama: alokasi anggaran untuk pembangunan, distribusi pendapatan dan substitusi untuk meningkatkan kesejahteraan, dan stabilisasi makroekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kebijakan fiskal dikoordinasikan oleh

¹ Triwahyuni Triwahyuni, 'Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam', *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), 199–210 <<https://doi.org/10.36908/asha.v6i2.209>>.

Kementerian Keuangan dan anggaran nasional digunakan untuk merangsang perekonomian. Namun Indonesia masih mengalami defisit anggaran. Selain kebijakan moneter, pemerintah juga mengatur kebijakan keuangan yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI). Untuk mencapai kemajuan jangka panjang, kebijakan fiskal dan fiskal harus terkait erat. Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk mengembangkan perekonomian. Selain itu, semua pelaku ekonomi harus bekerja sama satu sama lain dan mematuhi kepentingan bersama, karena hal ini hanya akan mempercepat kemajuan dan membantu menyelesaikan perselisihan.²

Menurut penelitian Santoso dan Baschi, produk domestik bruto (PDB) suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan keuangan dan budaya. Penerapan kebijakan-kebijakan ini yang tidak tepat dapat menimbulkan banyak hambatan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, kebijakan keuangan, pajak penghasilan, dari pengelolaan biaya digunakan saat ini. Kebijakan yang terbaik dan dapat diterima harus dipilih untuk menjamin pertumbuhan ekonomi.³ Stabilitas perekonomian didasarkan pada pengaturan peredaran uang. Bank Indonesia (BI) bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perbankan Indonesia No. 3/2004. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saling terkait untuk menyeimbangkan perekonomian, sehingga berdampak besar pada penguatan perekonomian.⁴

Kebijakan keuangan dan mata uang, khususnya dari perspektif Islam, memerlukan kerja sama. Untuk menjamin tingkat kebahagiaan tertinggi bagi masyarakat dan seluruh anggota masyarakat, prinsip-prinsip syariah harus dikembangkan dalam perekonomian. Prinsip-prinsip ini berperan penting dalam pembangunan material dan spiritual umat manusia dan dipandang sebagai metode yang paling tepat untuk mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Sinergi ini harus menjadi landasan penting untuk menjaga persatuan masyarakat dan stabilitas perekonomian. Dalam agama Islam, kesejahteraan individu dan masyarakat dipandang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam mengatur urusan masyarakat, Islam memperhatikan kepentingan individu dan sebaliknya, sehingga dinamika hubungan keduanya diperhatikan dengan cermat. Pendekatan Islam yang mengedepankan individualisme berfokus pada individu, masyarakat, dan hubungan keduanya. Hal ini menyebabkan terbentuknya sistem global saat ini dan menyebabkan munculnya sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Pendekatan Islam ini berbeda dengan pendekatan sosialis karena Islam menunjukkan kecenderungan ke arah sistem kapitalis. Di tingkat lokal, nasional, dan global, para ahli hukum Islam telah mendefinisikan peraturan ekonomi dalam konteks prinsip makroekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini penting untuk keberlanjutan dan pemerataan kegiatan ekonomi.⁵

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Fiskal

² Dodi Okri Handoko and others, 'Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.1 (2023), 12–20 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12616](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12616)>.

³ Teguh Santoso and Maruto Umar Basuki, 'Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia: Aplikasi Model Mundell-Fleming', *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5.2 (2009), 108–28 <<https://doi.org/10.33830/jom.v5i2.250.2009>>.

⁴ Arijo Hadi, Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, and Suparman Djapri, 'Bauran Kebijakan Fiskal-Moneter Dan Dampaknya Bagi Anggaran Pertahanan', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6.3 (2018) <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.318>>.

⁵ Helga Margareth, 'No Title طرق تدريس اللغة العربية', *Экономика Региона*, 2017, 32.

Dari sudut pandang Islam, pentingnya kerjasama antara kebijakan keuangan dan fiskal adalah hal yang penting. Dari sudut pandang makroekonomi, prinsip-prinsip dasar perekonomian tidak hanya berfungsi sebagai individu tetapi juga sebagai anggota masyarakat untuk mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi yang diperlukan. Kesejahteraan individu dan sosial saling berkaitan dan utama dalam Islam. Pengurus masyarakat Islam memperhatikan kepentingan pribadi dan dinamikanya.

Pendekatan Islam dalam menentukan prioritas didasarkan pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang mengutamakan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Fokusnya bukan hanya pada pilihan individu, tetapi juga pada dampaknya terhadap kesejahteraan bersama. Hal ini memunculkan dua sistem ekonomi yang berbeda, yaitu kapitalisme yang menekankan pada keuntungan pribadi dan sosialisme yang mengutamakan redistribusi kekayaan untuk kepentingan bersama.

Para ahli hukum Islam telah mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur ekonomi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mereka memadukan prinsip-prinsip makroekonomi dengan nilai-nilai etika Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, ekonomi bukan hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.⁶

B. Kebijakan moneter

Bank Sentral Indonesia berupaya menjaga nilai tukar rupiah, jumlah uang beredar, dan tingkat inflasi tetap stabil dengan menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan ini melibatkan pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan kebijakan moneter untuk mempertahankan target inflasi yang telah ditetapkan (seperti jumlah uang beredar dan suku bunga). Untuk mencapai tujuan ini, Bank Sentral mengontrol jumlah uang beredar dan menyesuaikan tingkat suku bunga jika diperlukan. Dengan demikian, hal ini berperan penting dalam menjamin stabilitas perekonomian dan menjaga inflasi tetap terkendali. Kebijakan moneter mencakup suku bunga, persyaratan cadangan, intervensi di pasar valuta asing, dan pemberian pinjaman sebagai upaya terakhir bagi bank. Jumlah uang dapat ditambah atau dikurangi untuk mengontrol pergerakan uang dalam masyarakat. Hal ini menjadi isu yang menarik karena pergerakan uang sangat mempengaruhi dinamika dan arah perekonomian. Oleh karena itu, lembaga kebijakan moneter harus mempertimbangkan aspek positif dan negatif. Pertama-tama, disiplin ilmu ini diterapkan untuk menstabilkan perekonomian dan mengendalikan tingkat inflasi. Hal ini memungkinkan perekonomian untuk mengembangkan struktur yang sehat dan beradaptasi terhadap perubahan yang cepat. Dua kategori utama kebijakan moneter adalah :

- a) Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter ekspansif biasanya diterapkan dalam upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.
- b) Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan yang berupaya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. kebijakan moneter kontraktif sering kali diperlukan untuk mengendalikan inflasi yang berlebihan atau untuk mengatasi masalah defisit

⁶ Muhammad Akhyar, Sofyan Syahnur, and Asmawati Asmawati, 'Analisis Interaksi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5.2 (2019), 112–23 <<https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15080>>.

anggaran. Di samping itu, kebijakan moneter kontraktif juga dapat membantu mencegah gejolak pasar keuangan yang berlebihan.

Oleh karena itu, penting bagi otoritas moneter untuk memilih kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi ekonomi dan tujuan jangka panjang perekonomian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Tinjauan literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode bottom-up. Ini mengimplikasikan bahwa sintesis dokumen melibatkan penjelajahan mendalam terhadap berbagai jurnal penelitian serta basis data yang signifikan. Dengan pendekatan ini, penulis mampu menyajikan gambaran yang komprehensif dan terperinci tentang topik yang dibahas dalam kajian ini. Tinjauan literatur adalah alat metodologis yang efektif untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian.

Tinjauan literatur sangat berguna ketika peneliti ingin mengevaluasi teori dan bukti dalam suatu bidang studi atau untuk menguji validitas atau keakuratan teori tertentu atau teori pesaing. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membuat gambaran komprehensif tentang kumpulan pengetahuan yang ada dalam literatur tentang topik tertentu. Dengan demikian, tinjauan pustaka berperan penting dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan memberikan landasan yang kuat untuk penelitian selanjutnya.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Instrumen Kebijakan Fiskal dan Moneter

Saat menerapkan kebijakan fiskal, penting untuk menyesuaikan berbagai penerapan perpajakan yang terutama digunakan oleh pemerintah. Menurut Bapak Adiwarman Karim, pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk menghimpun dana, oleh karena itu klasifikasi, penghitungan dan penerapan pajak dalam kerangka kebijakan fiskal menjadi sangat penting. Sebagai berikut:

- a. Leveraging business melalui operasional badan usaha milik negara (BUMN),
- b. Pemungutan pajak, dan
- c. Meminjam.

Di sisi lain, dalam konteks Islam, instrumen keuangan Islam cenderung berfokus pada kebijakan pendapatan, seperti pemungutan pajak dalam bentuk halaj, jizyah, dan qum, serta penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara. tercermin dalam anggaran nasional.⁸

Berikutnya, instrumen kebijakan fiskal terutama mengacu pada pengeluaran berupa pajak dan belanja pemerintah. Pajak merupakan instrumen fiskal utama untuk membiayai rencana pembangunan suatu negara dan merupakan kewajiban yang mengikat bagi seluruh warga negara. Namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menunjukkan

⁷ Galih Pranata and Indah Rahmawati Akbar, 'Tinjauan Historis: Toponimi Nama Kabupaten Subang', *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4.2 (2022), 104–13 <<https://doi.org/10.15548/thje.v4i2.4809>>.

⁸ Mike Oktaviana and Samsul Bahry Harahap, 'Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin', *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26.01 (2020), 283–307 <<https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>>.

pengeluaran untuk pertumbuhan masyarakat, asuransi kesehatan, operasional pemerintah, dan infrastruktur. Melaksanakan kebijakan anggaran surplus, kebijakan anggaran berimbang, kebijakan anggaran dinamis dan kebijakan defisit, kebijakan pendapatan dan belanja sesuai kebutuhan. Kebijakan moneter berbeda dengan kebijakan fiskal, yaitu operasi fiskal bank sentral.

Bank sentral menggunakan alat kebijakan moneter seperti rasio cadangan wajib, tingkat diskonto, dan operasi pasar terbuka. Ketiga upaya dasar tersebut diimplementasikan melalui upaya potensial lainnya seperti:

- a) Penetapan GWM oleh bank sentral. Hal ini mengharuskan bank untuk menyediakan cadangan kepada bank sentral yang dapat digunakan jika terjadi keadaan darurat. Masalah keuangan bank.
- b) Penetapan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral. Ini berfungsi sebagai pengaturan mata uang dan kontrol keuangan. Bank umum dapat meminjam dari bank sentral untuk meningkatkan profitabilitas bank jika tingkat diskonto berada di bawah tingkat bunga pasar.⁹

Dampak Pertumbuhan Fiskal dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan moneter dan keuangan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pengaruh kebijakan tersebut sangat penting dalam menentukan arah dan tingkat perekonomian. Secara khusus, kebijakan moneter dan keuangan mempunyai dampak yang menentukan terhadap indikator-indikator penting seperti inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi yang benar dan pengelolaan yang efektif dari kebijakan-kebijakan ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian suatu negara. Dampaknya sebagai berikut:

1. Suku bunga dan investasi:
 - a. Kebijakan moneter: Menurunkan suku bunga dapat merangsang pinjaman dan investasi korporasi. Kebijakan Fiskal: Pengeluaran investasi pemerintah dapat mendorong investasi swasta, merangsang kegiatan ekonomi, dan meningkatkan produksi. Hal ini menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan sektor bisnis.
2. Inflasi dan konsumsi:
 - a. Kebijakan moneter: Peraturan suku bunga dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan yang ketat dapat mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli konsumen. Kebijakan Fiskal: Insentif pajak dan stimulus fiskal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong konsumsi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Stabilitas keuangan:
 - a. Kebijakan moneter: Bank sentral memantau stabilitas keuangan dengan mengelola likuiditas dan memantau lembaga keuangan, sehingga mengendalikan keuangan Mencegah krisis. Kebijakan Moneter: Pengelolaan keuangan yang bijaksana dapat mengurangi risiko fiskal pemerintah dan meningkatkan kepercayaan investor.
4. Neraca Eksternal:
 - a. Kebijakan Moneter: Nilai tukar berubah, yang mempengaruhi daya saing impor dan ekspor. Intervensi bank sentral di pasar valuta asing juga mempengaruhi efektivitas

⁹ Zakiyatul Miskiyah and others, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam', *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022), 69–83.

kebijakan keuangan negara. Intervensi ini dapat membantu menciptakan keseimbangan eksternal yang sehat untuk menjamin stabilitas perekonomian negara.

Kebijakan fiskal: penurunan nilai tukar mata uang dan risiko impor dan ekspor dapat membantu negara tersebut menjadi lebih kompetitif di pasar global dan membantu stabilitas keuangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh penerapan kebijakan fiskal yang ketat dan pengendalian keuangan yang ketat.¹⁰

Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Perspektif Islam

Dalam agama Islam, aspek politik di bidang ekonomi sangatlah penting. Ajaran Islam menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus diselenggarakan secara adil dan manusiawi. Namun, kebijakan ekonomi Islam bisa efektif tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang masyarakat lainnya. Nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, kerjasama dan keberlanjutan, harus diperhitungkan ketika membuat kebijakan. Oleh karena itu, hubungan antara dimensi ekonomi dan politik Islam sangat penting bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Muslim. Imam Al Ghazali menekankan pentingnya kebijakan fiskal sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan berdasarkan prinsip iman, kehidupan, kecerdasan, kekayaan dan harta benda.

Dalam Islam, kebijakan moneter telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan pada masa Hurafaul Rasyiddin, dan dikembangkan lebih lanjut pada masa Khilafah Islam berikutnya. Cendekiawan Islam seperti Ibnu Khaldun pada tahun 1404 membahas cara mengurangi beban pajak dan meningkatkan belanja publik untuk mengatasi krisis ekonomi. Namun, penilaian ulang kebijakan moneter bukan hanya persoalan depresi ekonomi itu sendiri, namun juga merupakan langkah penting dalam mengusulkan pendekatan strategis terhadap perubahan masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan merevisi peraturan di tingkat keuangan dan memperkuat kemitraan publik. Abu Yusuf (798 M) juga menekankan kewajiban pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pokok rakyatnya dalam bukunya Al-Kharaji. Dia juga menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan pembayaran zakat wajib atas produk pertanian sebagai gantinya.¹¹

PENUTUP

Kesimpulan

Ada dua kebijakan utama yang mengendalikan pembangunan ekonomi: kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara efektif, kedua kebijakan tersebut harus bersifat sinergis. Ketika kerja sama antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bertentangan satu sama lain, proses perekonomian akan sangat menderita. Misalnya kebijakan moneter mengatur nilai barang, sedangkan kebijakan fiskal mengatur anggaran negara. Dalam situasi di mana kedua kebijakan tersebut tidak saling berkaitan, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan penuh

¹⁰ Imella Olivia, Fenina Feramitha Imran, and M Rifqi Aditya, 'Kebijakan Moneter Dan Fiskal : Analisis Dampak Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', 2.1 (2024), 29–34.

¹¹ Reisa Nadika Markavia, Fidri Nur Febriani, and Fitri Nur Latifah, 'Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2022), 81–91 <<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>>.

dengan kekurangan dan risiko. Oleh karena itu, kerja sama antar kebijakan yang tidak terkait merupakan salah satu elemen dasar perekonomian yang sehat dan maju..

Dua badan pemerintahan, Kementerian Keuangan sebagai otoritas kebijakan fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas kebijakan moneter, mempunyai solusi terhadap kedua permasalahan tersebut. Kerja sama kedua lembaga ini harus memastikan kombinasi kebijakan yang menguntungkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Potensi ekonomi syariah yang besar, seiring dengan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut dan ketaatan pada prinsip-prinsip Islam, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Indonesia merasa lebih nyaman dalam lingkungan yang adil melalui kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini berdampak nyata terhadap kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Saran

Di era globalisasi ekonomi saat ini, kerja sama kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks ekonomi syariah Indonesia. Melalui penelitian ini, kami menemukan bahwa kerja sama yang efektif antara kebijakan fiskal dan moneter dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Islam di negara tersebut. Hasil kami menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang baik dapat meningkatkan investasi, konsumsi, dan pertumbuhan sektor ekonomi yang terkait dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diperoleh dari studi ini dapat menjadi landasan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain: Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait dan adanya hambatan struktural dalam implementasi langkah-langkah kebijakan. Oleh karena itu kami menekankan pentingnya peran aktif pemerintah, lembaga keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat kerja sama kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kerja sama kebijakan keuangan serta pentingnya kerja sama kebijakan keuangan dalam konteks pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Muhammad, Sofyan Syahnur, and Asmawati Asmawati, 'Analisis Interaksi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5.2 (2019), 112–23
<<https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15080>>
- Hadi, Arijio, Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, and Suparman Djapri, 'Bauran Kebijakan Fiskal-Moneter Dan Dampaknya Bagi Anggaran Pertahanan', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6.3 (2018) <<https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.318>>
- Margareth, Helga, 'No Title طرق تدريس اللغة العربية', *Экономика Региона*, 2017, 32
- Markavia, Reisa Nadika, Fidzri Nur Febriani, and Fitri Nur Latifah, 'Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6.2 (2022), 81–91 <<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>>

- Okri Handoko, Dodi, Popi Adiyes Putra, Rifki Ismail, and Andri Soemitra, 'Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.1 (2023), 12–20 <[https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).12616](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12616)>
- Oktaviana, Mike, and Samsul Bahry Harahap, 'Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin', *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26.01 (2020), 283–307 <<https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>>
- Olivia, Imella, Fenina Feramitha Imran, and M Rifqi Aditya, 'Kebijakan Moneter Dan Fiskal: Analisis Dampak Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', 2.1 (2024), 29–34
- Pranata, Galih, and Indah Rahmawati Akbar, 'Tinjauan Historis: Toponimi Nama Kabupaten Subang', *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4.2 (2022), 104–13 <<https://doi.org/10.15548/thje.v4i2.4809>>
- Santoso, Teguh, and Maruto Umar Basuki, 'Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia: Aplikasi Model Mundell-Fleming', *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5.2 (2009), 108–28 <<https://doi.org/10.33830/jom.v5i2.250.2009>>
- Triwahyuni, Triwahyuni, 'Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam', *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), 199–210 <<https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.209>>
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, and Mahrus Suhardi, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam', *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022), 69–83